

Wacana Kesetaraan Gender Studi Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat

Lumban Arofah
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin, Indonesia
(al_arofah@yahoo.com)

Abstract— Dalam dekade terakhir ini, upaya pengarus utamaan gender menjadi diskursus di berbagai kalangan aktivis perempuan, keluarga-keluarga, wartawan, dunia pendidikan maupun kalangan politisi. Begitupun strategi-strategi telah ditawarkan dengan tujuan agar kesetaraan gender tercapai terutama dalam pendidikan yang dianggap dimensi kunci. Mengingat pentingnya kaitan antara gender dan pendidikan, penelitian ini akan berusaha untuk mendapatkan gambaran persepektif gender menurut Mahasiswa FKIP mengingat mereka disiapkan untuk menjadi guru pelajaran. Sehingga, perspektif mereka tentang gender nantinya akan diturunkan kepada anak-anak didik dimana mereka mengajar. Penelitian ini juga berusaha untuk menginvestigasi darimana wacana gender itu berasal dan bagaimana operasionalisasi konsep gender bagi mahasiswa.

Kata kunci:

I. PENDAHULUAN

Bagi suatu negara, pendidikan merupakan realisasi kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan yang dicita-citakan oleh pendirinya. Pendidikan merupakan komponen pokok dalam pembinaan landasan pengembangan sosial budaya sekaligus pencipta manusia yang memiliki peradaban tinggi. Pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat sekitar sehingga perlu dibuat sebuah sistem yang memperhatikan khasanah pendidikan dalam aras lokal

Karenanya, proses belajar mengajar merupakan kebutuhan penting hidup

manusia. Hal ini harus dirasakan bersama oleh setiap individu laki-laki dan perempuan tanpa pandang bulu. Karena sama-sama memiliki kemampuan untuk belajar. Semakin lama, setiap aspek kehidupan manusia berkembang, kebutuhannya pun kian beragam. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memiliki tingkat pembelajaran yang setara serta didukung oleh satuan pendidikan yang mendukung hal tersebut.

Kesenjangan pada bidang pendidikan dianggap menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap bidang lain di Indonesia, hampir semua sektor, seperti

lapangan pekerjaan, jabatan, peran dimasyarakat sampai pada masalah menyuarakan pendapat antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab bias gender adalah karena faktor kesenjangan pendidikan yang belum setara selain masalah-masalah klasik yang cenderung menjustifikasi ketidakadilan seperti intepretasi teks-teks keagamaan yang tekstual dan kendala sosial budaya lainnya. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat.

Dalam dekade terakhir ini, upaya pengarus utamaan gender menjadi diskursus di berbagai kalangan aktivis perempuan, keluarga-keluarga, wartawan, dunia pendidikan maupun kalangan politisi. Begitupun strategi-strategi telah ditawarkan dengan tujuan agar kesetaraan gender tercapai terutama dalam pendidikan yang dianggap dimensi kunci. Mengingat pentingnya kaitan antara gender dan pendidikan, penelitian ini akan berusaha untuk mendapatkan gambaran persepektif gender menurut Mahasiswa FKIP mengingat mereka disiapkan untuk menjadi guru pelajaran. Sehingga, perspektif mereka tentang gender nantinya akan diturunkan kepada Anak didik dimana mereka mengajar. Penelitian ini juga berusaha untuk menginvestigasi darimana wacana gender itu berasal dan bagaimana operasionalisasi konsep gender bagi mahasiswa.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana makna gender dan

apa makna kesetaraan gender bagi mahasiswa. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa tentang isu gender serta apa yang mereka ketahui tentang kesetaraan gender. Dengan diketahuinya pandangan tersebut, kiranya dapat menjadi pertimbangan asassemen awal terhadap tindakan apa yang dapat dilakukan institusi pendidikan dalam memberikan intervensi.

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat kualitatif, sehingga data yang dikumpul dan dianalisa bersifat deskriptif, naratif, argumentative yang melalui paparan kalimat-kalimat. Alasan memilih metode penelitian kualitatif ini karena data yang akan dikumpulkan berisi pandangan mendalam tentang pengetahuan gender yang dimiliki para mahasiswa FKIP Unlam di Banjarmasin yang tidak dapat dicapai melalui ukuran penghitungan angka-angka. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini mempengaruhi pilihan penentuan lokasi penelitian, penentuan informan, Jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan dan analisa data yang akan diteliti

II. LANDASAN TEORI

A. Teori-teori Gender

Menurut Marzuki (2013: 1-15) secara khusus belum ditemukan teori yang melihat dan membicarakan persoalan gender. Teori yang digunakan dalam melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial dan psikologis

Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak

diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis, untuk memperbincangkan permasalahan gender, dalam kesempatan ini akan dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting dan cukup populer.

B. Teori Struktural-Fungsional

Pendekatan struktural-fungsional mengakui adanya segala berbagai perbedaan dan keragaman di dalam kehidupan sosial. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan konsekuensi adanya perbedaan struktur, status, dan peran dalam masyarakat sebagai sebuah sistem. Dalam sebuah organisasi sosial pasti terdapat perbedaan posisi yang mengandung potensi status dan peran yang pada tujuannya menciptakan tujuan organisasi yang akan menimbulkan keharmonisan, keteraturan bagi keseluruhan sistem dalam masyarakat. Adanya perbedaan struktur dan fungsi dalam masyarakat dipengaruhi oleh pranata, sistem sosial, dan sistem norma yang berlaku secara ajeg dalam masyarakat. (Ratna Megawangi, 1999: 56).

Pendekatan struktural-fungsional dianggap masih relevan jika diterapkan dalam masyarakat modern. Pembagian peran secara jenis kelamin dianggap sebagai suatu yang biasa dan wajar adanya (Nasaruddin Umar, 1999: 53). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Penyimpangan terjadi karena munculnya konflik antar fungsi dalam keluarga. Oleh karena itu, maka sistem sosial berupa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus dijamin keutuhannya.

Prinsip yang sama berlaku untuk keluarga di masyarakat modern. Gangguan diminimalkan, harmoni dimaksimalkan, dan dan keluarga bermanfaat ketika pasangan saling membutuhkan satu sama lain. (Parsons dan Bales, 1955; Parsons, 1966). Ketika suami/ayah mengambil peran instrumental, ia diperkirakan akan mempertahankan integritas fisik keluarga dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal dan menghubungkan keluarga ke dunia luar rumah. Ketika istri/ibu mengambil peran privat, ia diharapkan untuk mempererat hubungan dan memberikan dukungan dan memelihara kegiatan emosional yang menjamin berjalan rumah tangga lancar. Jika terlalu banyak penyimpangan dari peran-peran ini terjadi, atau ketika ada terlalu banyak tumpang tindih, sistem keluarga didorong ke dalam keadaan ketidakseimbangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup unit keluarga Lindsey LL and Christie S. (1997: 6).

C. Teori Sosial-Konflik

Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh R. Dahrendorf, dan Randall Collins. Asumsi yang dipakai dalam pengembangan pendekatan sosial-konflik berasal dari teori determinisme ekonomi Marx. Teori ini berpandangan bahwa walaupun manusia telah memiliki pola hubungan sesuai dengan sistem sosial yang ajeg, namun pola tersebut dibentuk atas kepentingan individu atau kelompok sosial, hal tersebut cenderung akan menghasilkan konflik sosial. Pandangan teori ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa konflik sosial merupakan sumber perpecahan masyarakat, lebih lanjut, teori ini

berpendapat bahwa konflik sosial yang disebabkan karena pendistribusian daya yang terbatas terutama kekuasaan justru menjadi dasar dari munculnya perubahan sosial di masyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 81).

Akumulasi harta, benda, serta kontrol laki-laki atas produksi menjadi sebab insubordinasi perempuan baik di masyarakat maupun di keluarga. Negasi teori ini sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menunjukkan keunggulan antara kaum kapitalis dan kaum pekerja. (Nasaruddin Umar, 1999: 62).

Teori konflik sependapat dengan pandangan Engels dengan menyarankan bahwa ketika wanita mendapatkan kekuatan ekonomi dengan juga menjadi penerima upah, kekuasaan mereka di dalam rumah akan diperkuat dan dapat menyebabkan pengaturan yang lebih egaliter Lindsey LL and Christie S. (1997; 8).

D. Teori Feminisme

Teori feminis yang menawarkan kerangka terhadap organisasi perempuan dalam upaya untuk mengubah posisi sosial perempuan yang rendah dari posisi sosial, politik, dan diskriminasi ekonomi serta pola dan tindakan yang mengabadikan hal tersebut. Banyak organisasi dibawah jaringan dan payung feminisme, bertujuan untuk mengakhiri persoalan seksisme dan penindasan seksis dengan memberdayakan perempuan. Tiga puluh tahun lalu gerakan perempuan tersendat karena tidak realistis menjelaskan bagaimana kategori penindasan yang saling berpotongan satu sama lain (Breines, 2006). Melalui upaya jaringan feminis di seluruh dunia dan

di bawah kepemimpinan PBB dan konferensi perempuan mereka terorganisir dan persoalan ini dijembatani.

Perempuan dan laki-laki mengidentifikasi dengan organisasi dan prinsip-prinsip yang mungkin jatuh di bawah lebih dari satu cabang. Selain itu, cabang adalah cairan, mereka terus menciptakan sendiri gelombang yang berbeda feminisme mengalir melalui masyarakat. Cabang feminis, oleh karena itu, tidak saling eksklusif atau lengkap. Feminis sebagai individu atau formal kelompok mana mereka berasal, namun, umumnya berlangganan prinsip-prinsip satu atau lain dari cabang-cabang berikut.

E. Teori Feminisme Liberal

Feminisme liberal, juga disebut "feminisme egaliter dan feminisme mainstream" dianggap sebagai cabang yang paling moderat. Hal ini didasarkan pada proposisi sederhana yang menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan oleh karenanya kesetaraan kesempatan tidak boleh ditolak karena gender. Karena kedua jenis kelamin sama-sama diberi manfaat dengan adanya penghapusan seksisme, pria diintegrasikan ke dalam feminisme ini. Feminisme liberal didasarkan pada pencerahan terhadap keyakinan rasionalitas, pendidikan, dan hak-hak alam yang berlaku untuk semua laki-laki dan perempuan. Hal ini dituangkan dalam John Stuart Mill (1869/2002) *The Subjection of Women*-Ketaatan Perempuan, dengan pernyataannya bahwa "apa yang sekarang disebut sifat perempuan merupakan hal - yang nyata buatan hasil dari penindasan paksa di beberapa arah, stimulasi tidak wajar

pada orang lain . " Wanita bisa bekerja sama dalam sistem pluralistik dan memobilisasi konstituen mereka untuk efek perubahan sosial yang positif dan produktif. Tuntutan akan terpenuhi jika dipegang oleh mobilisasi efektif dan tekanan efisien (Deckard, 1983:463). Feminis liberal percaya masyarakat tidak harus benar-benar direstrukturisasi untuk mencapai pemberdayaan bagi perempuan dan memasukkan perempuan ke dalam dan peran yang lebih adil .

Teori ini mendasarkan pandangannya pada tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, maka perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di dalam kehidupan publik maupun domestik, di masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga. Namun, pandangan teori ini menolak pandangan tidak adanya perbedaan menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut terletak dari unsur biologis yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan akibat dalam kehidupan di masyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 228).

F. Feminisme Cultural

Feminis liberal juga dapat disebut dengan "feminism budaya" dengan menfokuskan pada pemberdayaan perempuan dengan menekankan kualitas positif yang terkait dengan peran perempuan seperti pengasuhan, peduli, kerjasama, dan keterhubungan kepada orang lain (Worell, 1996:360).

G. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Feminisme ini disebut juga sebagai " feminisme Marxis , " feminisme sosialis umumnya mengadopsi Model Marx- Engels yang dijelaskan sebelumnya dimana menghubungkan posisi inferior perempuan pada sistem kapitalisme berbasis kelas dan keselarasan dengan keluarga patriarkal di kapitalistik masyarakat. Pria dan wanita mempertahankan kepentingan dalam kelompok jenis kelamin mereka sendiri, sehingga tidak jelas apakah sosialisme yang berjuang untuk adalah sama bagi pria dan wanita (Hartmann, 1993).

Teorema dasar dari pandangan ini meniru pandangan yang dikembangkan oleh Karl Marx yang melihat penindasan kaum proletar oleh kaum kapitalis. Marx berpendapat bahwa kaum proletar harus disadarkan agar tidak mendapatkan penindasan dari kaum borjuis. Penyadaran yang sama harus dilakukan kepada kaum perempuan agar mereka sadar bahwa dalam sistem sosial keluarga tradisional mereka adalah kaum yang tertindas. Dengan adanya penyadaran tersebut, kaum perempuan akan bangkit dan merubah keadaan dari sistem sosial tersebut (Ratna Megawangi, 1999: 225).

H. Teori Feminisme Radikal

Secara umum, teori ini hampir serupa dengan teori feminisme marxis-sosialis. Namun teori ini banyak menganalisa sistem patriarkhi dan lembaga keluarga. Lembaga sosial terutama keluarga merupakan tempat berkembangnya dominasi laki-laki atas perempuan. Feminis tipe ini cenderung untuk mendorong perempuan agar mandiri dan menafikkan

keberadaan laki-laki. Lebih lanjut, teori ini berpendapat bahwa menjadi lesbian merupakan jalan untuk terbebas dari dominasi laki-laki. Dan oleh karena itu, lesbianism adalah salah satu sarana dan cara yang perlu dijadikan oleh acuan bagi perempuan untuk mandiri. (Ratna Megawangi, 1999: 226).

Feminis radikal kontemporer percaya bahwa seksisme merupakan inti dari masyarakat patriarkaldan semua lembaga sosial mencerminkan seksisme tersebut. Ketika feminisme liberalfokus pada kerja dan perubahan hukum, feminis radikal fokus pada keluarga patriarkal sebagai situs utama dominasi dan penindasan (Shelton dan Agger , 1993).

1. Feminisme Multicultural dan Global

Perhatian terhadap isu-isu keragaman di tingkat makro jelas antara feminis yang mengatur sekitar isu-isu multikultural dan global. Cabang feminis ini berfokus pada titik persimpangan gender dengan ras, kelas , dan isu-isu yang berkaitan dengan penjajahan dan eksploitasi perempuan di negara berkembang . Feminisme global adalah pergerakan orang yang bekerja untuk perubahan melintasi batas-batas nasional. Dunia ini saling tergantung dan menjadi lebih luas. Feminisme global berpendapat bahwa tidak ada wanita yang bebas dari ketergantungan dan dominasi sampai kondisi yang menindas perempuan di seluruh dunia dieliminasi (Bunch ,1993:249) .

Feminisme multikultural berfokus pada unsur-unsur budaya tertentu dankondisi sejarah yang berfungsi untuk mempertahankan penindasan perempuan . Di Amerika Latin, misalnya , rezim militer

telah menyusun pola tertentu hukuman dan perbudakan seksual bagi perempuan yang menentang rezim mereka (Bunster - Bunalto , 1993) .

J. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme merupakan wacana ketidakpuasan perempuan terhadap kondisi ekologi dunia yang semakin kritis dan bertolak belakang dari teori feminisme lainnya. Jika teori feminisme cenderung untuk melihat perempuan sebagai makhluk otonom dan dapat menentukan hidupnya sendiri serta lepas dari pengaruh lingkungan tempat mereka berada. Kondisi tersebut mengakibatkan manusia lepas dari pengaruh alam. Pendekatan ekofeminisme percaya bahwa individu baik laki-laki maupun perempuan adalah makhluk yang tidak akan sepenuhnya lepas dari alam. Sebagai makhluk, manusia selalu bergantung dari alam (Ratna Megawangi, 1999: 189).

Beberapa perempuan ditarik ke dalam feminisme oleh aktivis lingkungan. wanita-wanita ini adalah katalis ecofeminism, cabang baru feminisme. Ecofeminism menghubungkan degradasi dan penindasan terhadap perempuan dengan degradasi ekosistem. Berbasis pada citra spiritual bumi, ecofeminism menunjukkan bahwa dunia agama memiliki tanggung jawab etis untuk menantang sistem patriarki perusahaan globalisasi yang memperdalam pemiskinan bumi dan orang-orangnya (Lowdan Tremayne, 2001; Ruether, 2005). Planet ini dapat disembuhkan dan ekologi harmoni dipulihkan melalui aksi politik menekankan prinsip kesetaraan semua makhluk bumi (Bowerbank, 2001). Dengan sudut pandang holistik dan

menekankan pada saling ketergantungan dalam segala bentuknya, ecofeminism sangat kompatibel dengan feminisme global.

K. Teori Psikoanalisa

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Menurut Marzuki (2013: 1-15), Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. *Id* sebagai pembawa sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. *Id* bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. *Ego* bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id*. *Ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Superego* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id* (Nasaruddin Umar, 1999: 46).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat kualitatif, sehingga data yang dikumpul dan dianalisa bersifat deskriptif, naratif, argumentative yang melalui paparan kalimat-kalimat. Alasan memilih metode penelitian kualitatif ini karena data yang akan dikumpulkan berisi pandangan mendalam tentang pengetahuan gender yang dimiliki para mahasiswa FKIP Unlam

di Banjarmasin yang tidak dapat dicapai melalui ukuran penghitungan angka-angka. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini mempengaruhi pilihan penentuan lokasi penelitian, penentuan informan, Jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan dan analisa data yang akan diteliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Pengarusutamaan gender merupakan tema yang selalu belum mendapat tempat yang layak terutama di Negara-negara berkembang (Pitts, 2011: 11-14). Selain itu di dalam Lembaga-lembaga International pun, hal serupa juga terjadi. Indonesia dipandang sebagai Negara yang masih dalam tahap yang dini dalam menginisiasi munculnya pengarusutamaan Gender.

Hal tersebut tidak lepas dari masih dicarinya strategi yang memungkinkan munculnya pekerjaan yang masih dicari formatnya, karena ideology Negara yang sebelumnya berbeda ketika era reformasi. Aparatur Negara masih dianggap belum menemukan format yang jelas tentang bagaimana pengarusutamaan gender akan dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketidaksanggupan aparatur dalam menunjukkan perwakilan gender yang memadai dan memiliki kapabilitas yang luas ketika mengambil keputusan, bagaimana mengejawantahkan kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia

Trend tentang pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai ketika pergantian rejim dari rejim orde baru ke rejim reformasi. Hal tersebut diinisiasi dengan dibuatnya Undang-undang yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender.

Namun disisi lain, terdapat kelompok-kelompok lain yang tidak setuju dengan pengarusutamaan gender juga memperkuat posisinya ditengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut, kronologis pengarusutamaan gender di Indonesia akan ditampilkan dalam lampiran.

Agenda pengarusutamaan gender mengalami titik kulminasinya ketika adanya peristiwa 11 September 2001 yang dibarengi oleh invasi Amerika ke Afganistan dan Irak. Pengarusutamaan gender sebagai salah satu program Pemerintah dan berbagai Organisasi perempuan dikhawatirkan akan dianggap merupakan agenda dan kebijakan dari Negara-negara barat yang dipaksakan ke Negara-negara berkembang.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendukung pengarusutamaan gender di Indonesia. Salah satunya dengan membuat Undang-undang dan Peraturan yang mendukung kearah pengarusutamaan gender, antara lain;

- Peraturan Pemerintah nomor IV-1999 perihal Pedoman luas Kebijakan Negara 1999-2004 menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu amanat bagi pembangunan nasional.
- Selanjutnya, Undang-undang nomor 22/2000 tentang Program Pembangunan Nasional menegaskan kesetaraan dan keadilan gender sebagai isu pembangunan dalam segala bidang.
- Keputusan Presiden nomor 163/1999, kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender.

- Inpres nomor 9/2000 yang berisi pedoman mengenai cara mengikutsertakan isu gender dalam program dan kebijakan pembangunan dalam semua lapisan pemerintahan Indonesia.
- Pembangunan Nasional jangka menengah tahun 2004-2009 (Peraturan Pemerintah No. 7/2005) didesain untuk mempromosikan kualitas kehidupan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender.

B. Usaha Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek yang penting dalam usahanya mengembangkan sebuah kebijakan sosial yang memberikan kesempatan yang sama dalam hal hak dan kewajiban kepada berbagai individu (Piits, 2011: 8-14)

Pengarusutamaan Gender dituangkan ke dalam Beijing Action Platform yang memberikan tujuan agar perempuan dapat mengidentifikasi dan mengetahui keunggulan apa saja yang ada dalam dirinya sendiri, kemudian dengan mengetahui keunggulan mereka, hal tersebut dapat disalurkan dan memberikan dampak positif kepada orang lain.

Beberapa tujuan strategis yang ingin dicapai dalam platform tersebut antara lain;

1. Memberikan akses yang seimbang antara Laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan.

2. Diminimalisirnya buta huruf dan ketidakberaksaraan terutama di kalangan perempuan.
3. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk mengikuti pelatihan, vokasi, dan iptek serta berbagai pendidikan lanjutan.
4. Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan yang tidak diskriminatif.
5. Memberikan sumberdaya yang cukup.
6. Memperkenalkan *long-live education* bagi perempuan.

Disamping memberikan penyadaran dan promosi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan, platform ini juga menyadarkan kepada khalayak ramai akan adanya tindakan-tindakan yang dianggap memberikan kontribusi terhadap mundurnya tindakan pengarusutamaan gender. Tindakan tersebut antara lain;

1. Sikap dari beberapa adat dan kebudayaan yang menempatkan perempuan dibawah Laki-laki. Kondisi tersebut melanggengkan sikap dominasi Laki-laki terhadap perempuan. Sikap tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan
2. Adanya pernikahan dini yang berujung pada kehamilan dini. Kedua hal tersebut saling kait-mengkait satu sama lain, pernikahan dan kehamilan dini berkaitan dengan bagaimana sikap dan kondisi psikologis perempuan. Dengan adanya tindakan yang dilakukan pada saat usia yang belum matang,

dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kondisi pernikahan dan janin yang dikandungnya.

3. Belum dipahaminya pengetahuan tentang Gender oleh Pendidik di berbagai jenjang pendidikan.
4. Terlalu beratnya beban bagi perempuan dalam pekerjaannya di sektor domestik.

Lebih lanjut Platform tersebut juga menjelaskan bagaimana cara mengenali dan mengetahui bagaimana diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan dapat terjadi melalui beberapa hal berikut:

1. Terdapat Sumber belajar dan Pendidikan yang terdiri dari materi, buku, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang tidak menunjang pengarusutamaan gender namun justru menyimpan
2. Kurangnya fasilitas penunjang pendidikan, terutama untuk keperluan khusus.
3. Adanya gambar-gambar visual yang justru menunjukkan pandangan tradisional tentang perempuan sehingga mengakibatkan menebalnya gambaran stereotip dominasi Laki-laki atas perempuan. Kondisi tersebut akan menebalkan dominasi tersebut bahkan diajarkan dalam buku-buku pelajaran untuk anak usia dini.

Hasil penelitian dari tim Universitas Pendidikan Indonesia menemukan data bahwa pada tahun 2001 Index Pembangunan Gender di Indonesia menempati urutan 91 dari 144 negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan



gender masih merupakan tema yang harus diperjuangkan di Indonesia. Di bidang pendidikan, walaupun UU menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan, namun dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan untuk belajar. Sebagai contoh, tahun 1980 hanya 63% perempuan yang tidak buta aksara, sementara angka bagi Laki-laki telah mendekati 80%. Namun, pada saat ini kesenjangan yang ada masih saja terjadi.

Fenomena ketimpangan Gender di bidang pendidikan nampaknya masih sangat kuat. Anak perempuan bukanlah merupakan prioritas untuk melanjutkan pendidikan. Sebagai contoh, munculnya anggapan bahwa perempuan tidak cocok untuk sekolah di jenjang kejuruan, jikalau boleh, hanya untuk jenjang kejuruan tertentu, seperti SMK Tata Boga, SMK Tata Busana, SMK Perhotelan. Sementara itu, sekolah Kejuruan berbasis teknik, mesin, dan otomotif rata-rata dipersepsikan sebagai sekolah khusus laki-laki. Di jenjang Perguruan Tinggi, hal tersebut juga terjadi. Dimana mayoritas Perguruan Tinggi dengan Program Studi Teknik kebanyakan siswanya berasal dari jenis kelamin Laki-laki.

Permasalahan gender di Indonesia terlihat dari beberapa aspek antara lain, aspek pemerataan pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan sumber daya manusia, kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, dan lain-lain. Salah satu factor yang menyebabkan kesenjangan gender tersebut terlihat dari faktor sosial budaya berupa adat-istiadat setempat yang tidak sesuai dengan usaha pengarusutamaan gender.

Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain:

Pengarusutamaan Gender terutama dalam bidang pendidikan dapat ditemukan dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" dan Pasal 20 yang memperinci bahwa pemerintah menyediakan suatu sistem pendidikan nasional yang didukung oleh hukum. Oleh karena itu, maka Pemerintah Indonesia kemudian membentuk berbagai Program Pendidikan Wajib Nasional 1994 yang mewajibkan pendidikan selama 9 tahun atau sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Lebih lanjut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-undang Nomor 20/2003 (UU) mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Semangat dari Undang-undang ini adalah bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan Pemerintah harus memberikan kesempatan ini kepada setiap warga Negara, terlepas dari asal, jenis kelamin, status ekonomi sosial dan agama, sehingga setiap orang dapat memiliki akses ke semua bentuk dan tingkat pendidikan yang sama (Widodo, Hariyati and Sugiarti dalam Pitts: 2011, 3).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengembangkan kebijakan untuk mengatasi adanya kesenjangan pengetahuan gender dalam pendidikan (Sardjunani: 2008, 3). Kementerian telah mulai memperbaiki kurikulum dan mencoba membuat bahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berwawasan

gender, baik dari segi kualitas maupun relevansi di bidang Pendidikan. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan kualitas para guru dan dosen dengan terus mengadakan pelatihan pendidikan yang menyangkut pemahaman isu-isu gender, pentingnya sikap berwawasan gender, dan penerapan sensitivitas gender dalam proses belajar mengajar.

C. Perspektif Gender Menurut Mahasiswa

Sub bab berikut akan menggali tentang bagaimana perspektif Mahasiswa tentang Pengarusutamaan Gender. Sub bab ini akan berusaha untuk menggali tentang bagaimana perspektif mahasiswa dan bagaimana perspektif tersebut berasal.

Salah seorang mahasiswa, Kr melihat kesetaraan gender sebagai sebuah posisi dimana seorang perempuan memiliki peran yang sama, setara, dan seimbang dalam perannya di masyarakat. Diharapkan dengan adanya posisi yang sama, setara, dan seimbang tersebut akan muncul kesetaraan akan status antara Laki-laki dan Perempuan.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Nw yang menyatakan bahwa kesetaraan gender dipahami sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban yang sama antara Laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan. Nw berpendapat bahwa tidak ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan secara spesifik oleh jenis kelamin tertentu. Setiap pekerjaan bisa saja dilakukan oleh baik oleh laki-laki maupun perempuan, yang membedakan adalah konstruksi sosial seseorang yang terkadang dihubungkan dengan jenis kelamin.

Ws dan MA melihat pekerjaan, profesi, maupun kebiasaan yang bisa

dilakukan oleh Laki-laki juga bisa dilakukan oleh perempuan, kondisi tersebut senada dengan pendapat lainnya yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan pencapaian pekerjaan antara laki-laki dengan perempuan.

Sementara salah seorang Mahasiswa, Sr mencerninkan pernyataan bahwa antara Laki-laki dan Perempuan hanya dibedakan oleh faktor biologis yaitu faktor fisik semata. Kondisi tersebut tidak dapat dipertukarkan, namun posisi seseorang di masyarakat dapat dilakukan sehingga tidak ada perbedaan antara Laki-laki dan perempuan.

Sementara pendapat dari PSR, Nn, dan AS menganggap bahwa kesetaraan Gender tersebut adalah sebuah peran yang dimiliki oleh Laki-laki maupun Perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap jenis kelamin memiliki kehidupan sendiri-sendiri yang tidak dapat lagi dipertentangkan. Hal tersebut mengingat bahwa setiap individu yang memiliki jenis kelamin berbeda memiliki kondisi biologis tertentu yang konsekwensinya akan memiliki peran yang berbeda pula.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa antara Laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kondisi yang tidak dapat disatukan. Antara Laki-laki dan perempuan telah memiliki sikap dan tanggung jawab sendiri-sendiri yang masing-masing diantaranya memiliki konsekwensi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut mengakibatkan bahwa Laki-laki harus didudukkan lebih tinggi dibandingkan dengan Perempuan. Hal tersebut

dikarenakan pemimpin keluarga adalah Laki-laki, sementara Perempuan hanya bisa menjadi anggota keluarga atau pendamping suami.

D. Pendapat Mahasiswa Tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender.

Sub bab ini akan membahas tentang bagaimana pendapat mahasiswa tentang konsep kesetaraan dan pengarusutamaan gender dan apa saja yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Sebagian mahasiswa setuju bahwa perlu adanya perjuangan untuk melakukan kesetaraan gender di masyarakat. Hal itu tidak lepas dari masih adanya hambatan akan kesetaraan gender yang masih mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Kr berpendapat akan persetujuannya dalam menghadapi kesetaraan gender, karena dengan adanya kesetaraan gender dapat menjadi masyarakat yang memiliki keadilan dalam pelaksanaan gender. Dengan adanya kesetaraan gender, diharapkan muncul keadilan dalam memperlakukan hak dan kewajiban antara Laki-laki dan Perempuan. Oleh karena itu, maka perlu diwujudkan melalui upaya untuk membangkitkan kesadaran perempuan melalui pemberian keleluasaan bagi perempuan untuk berkembang di masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi Perempuan terutama yang berkeluarga untuk mengembangkan diri dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya dengan memberikan kesempatan Perempuan untuk bekerja. Selain itu, Perempuan juga harus diberi kesempatan

untuk berbicara dan menyampaikan pendapat yang sama dengan Laki-laki. Harapannya, tercipta harmoni antara Laki-laki dan Perempuan.

Pendapat tersebut boleh jadi diakibatkan karena, Narasumber melihat bahwa masih ada hambatan bagi Perempuan untuk mengembangkan diri dibandingkan Laki-laki. Salah satu contoh yang mengemuka adalah adanya anggapan dimana perempuan tidak perlu untuk disekolahkan tinggi karena toh nanti kembali ke rumah juga. Kondisi tersebut dapat dianggap merupakan halangan dari terciptanya kesetaraan gender.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ws yang menyatakan persetujuannya bagi perempuan untuk dapat bekerja dan memiliki kedudukan yang setara dengan perempuan. Hal tersebut tidak lepas dari bagaimana perempuan dapat menjadi tenaga kerja yang potensial untuk mencukupi nafkah di keluarga, terutama ketika terjadi krisis dalam keluarga. Dengan adanya kesetaraan tersebut, maka perempuan tidak dapat hanya dikategorikan sebagai pendamping Laki-laki namun juga sebagai mitra dalam keluarga. Selain itu, Ws berpendapat bahwa antara Laki-laki dan perempuan sudah sewajarnya diberikan porsi yang sama dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, karena itu walaupun Laki-laki masih dianggap pemimpin keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarga, sudah sewajarnya mempertimbangkan masukan, dari masing-masing pihak dari anggota keluarga yang lain seperti Istri dan Keluarga.

Informan melihat hasil dari kesetaraan Gender yang telah dicapai melalui dunia

pendidikan. Saat ini, baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan dapat dianggap merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kepedulian akan kesetaraan gender. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ws seperti tertuang di bawah ini;

Salah satu informan UN yang menyatakan persetujuannya akan konsep kesetaraan gender. Dengan konsep tersebut, akan tercipta kehidupan yang harmonis antara Laki-laki dan Perempuan sehingga, dikemudian hari diharapkan kehidupan harmonis tersebut akan menumbuhkan Keluarga yang harmonis pula. Oleh karena itu, perlu didorong adanya sikap yang menerima perempuan sebagai mitra perempuan dibandingkan hanya sebagai pendamping Laki-laki. Dengan adanya sikap tersebut, maka urusan rumah tangga dapat dijadikan sebagai urusan bersama, dan pada gilirannya akan menimbulkan harmoni dalam keluarga. Selain itu, dengan dikembangkannya potensi perempuan, akan membuat perempuan semakin mandiri dan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pendapat dari UN tersebut salah satunya disebabkan masih dijumpainya diskriminasi berbasis gender dimasyarakat. Salah satunya adalah adanya pembatasan bagi Perempuan untuk dapat menjadi pemimpin. Oleh karena itu, menurut narasumber, perlu dikembangkan upaya untuk mengembangkan usaha sadar gender dan hal tersebut dapat dimulai dari rumah. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh AF yang memandang bahwa terkadang

dalam urusan sehari-hari contohnya dalam Organisasi Kemahasiswaan, masih terdapat diskriminasi gender yang terjadi. Seperti hasil wawancara berikut ini;

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh beberapa mahasiswa berikut yang menyatakan ketidaksetujuannya akan adanya kesetaraan gender. Hal tersebut dikarenakan, antara Laki-laki dan Perempuan masing-masing telah memiliki fungsi dan tugas masing-masing sehingga keduanya tidak dapat diperdebatkan hak dan kewajibannya masing-masing, selain itu adanya kesetaraan gender dikhawatirkan akan konflik dalam keluarga ketika adanya posisi yang setara antara Laki-laki dan Perempuan dalam keluarga.

Pendapat Nn tidak setuju, karena sebetulnya Laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan, oleh karena itu maka Perempuan hanya menjadi pendamping saja bagi laki-laki di rumah tangga. Namun, menurut Narasumber, walaupun berbeda tetap saja Perempuan harus dilibatkan dalam urusan pengambilan keputusan sehari-hari, mengingat perempuan juga memiliki tugas yang tersendiri di rumah tangga.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Nw yang menyatakan akan ketidasetujuannya dalam kesetaraan gender karena dapat memicu angka perceraian dalam keluarga. Wujud dari kesetaraan gender adalah diperbolehkannya perempuan untuk bekerja diluar sektor domestik. Dikhawatirkan, ketika perempuan bekerja maka akan timbul ego yang tinggi antara perempuan maupun laki-laki. Ego tersebut akan menimbulkan rasa ingin menang sendiri yang pada gilirannya akan berakibat



konflik yang terbuka dalam keluarga. Tentu saja akan mengakibatkan disharmoni dan berujung pada keretakan rumah tangga. Oleh karena itu menurut narasumber, kondisi yang ideal adalah Perempuan bukan menjadi mitra Laki-laki namun menjadi pendamping Laki-laki. Sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara berikut ini.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pandangan dari mahasiswa tentang kesetaraan gender:

Pertama, pandangan mahasiswa berpendapat bahwa kesetaraan gender itu adalah kesamaan posisi, derajat, kedudukan, hak, dan kewajiban antara Laki-laki dan Perempuan. Implikasi dari pandangan tersebut terletak dari pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara Laki-laki dan perempuan dalam memperoleh dan mendapatkan posisi di masyarakat. Setiap individu berhak mendapatkan posisinya di masyarakat tanpa adanya pembatasan dari jenis kelamin lainnya. Oleh karena itu, perempuan dan Laki-laki berhak untuk memperjuangkan posisinya masing-masing.

Pendapat tersebut sesuai dengan Teori Feminisme Liberal yang juga disebut "feminisme egaliter dan feminisme mainstream" dianggap sebagai cabang yang paling moderat. Hal ini didasarkan pada proposisi sederhana yang menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan oleh karenanya kesetaraan kesempatan tidak boleh ditolak karena gender. Karena kedua jenis kelamin sama-sama diberi manfaat dengan adanya

Teori ini mendasarkan pandangannya pada tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, maka perempuan dan laki-laki memiliki hak dan

kewajiban yang sama baik didalam kehidupan publik maupun domestik, di masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga. Namun, pandangan teori ini menolak pandangan tidak adanya perbedaan menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut terletak dari unsur biologis yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan akibat dalam kehidupan di masyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 228).

Kedua, pandangan mahasiswa yang percaya bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan oleh karena itu maka perbedaan akan konstruksi sosial antara keduanya harus dihapuskan. Namun, ada perbedaan yang tidak dapat dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut terletak pada fisik antara jenis kelamin tersebut, atau dalam kata lain terdapat perbedaan biologis antara keduanya. Oleh karena itu, maka walaupun dimungkinkan tidak ada perbedaan dalam konstruksi sosial, namun perbedaan dalam hal biologis akan berpengaruh dalam hal kehidupan dan peran peran juga dimasyarakat.

Pendapat tersebut sama dengan teori Feminis liberal juga dapat disebut dengan "feminism budaya" dengan menfokuskan pada pemberdayaan perempuan dengan menekankan kualitas positif yang terkait dengan peran perempuan seperti pengasuhan, peduli, kerjasama, dan keterhubungan kepada orang lain (Worell, 1996:360).

Masalah berapa banyak wanita sama dan berapa banyak mereka berbeda disorot



dalam penekanan ini, meskipun tidak merupakan cabang terpisah dari feminisme keseluruhan, perdebatan sekitar "Tingkat perbedaan jenis kelamin atau kesamaan" telah memungkinkan feminisme budaya menjadi tergabung dalam semua cabang feminis pada tingkat tertentu. Feminis liberal, namun, lebih mungkin untuk berhubungan prinsip-prinsip ini dari pada wani tadi cabang lain.

Ketiga, pandangan mahasiswa yang tidak menyetujui kesetaraan gender. pandangan tersebut berasal dari kenyataan bahwa Mahasiswa memandang tidak perlu ada kesetaraan gender, karena peran dan posisi masing-masing individu tidak lah sama. Oleh karena itu, mengingat peran dan posisi masing-masing telah ditentukan baik oleh faktor biologis maupun faktor sosial, maka tidak perlu ada kesetaraan gender.

Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat dari teori gender/feminisme struktural fungsional dimana, dalam hal pembagian jenis kelamin berdasarkan gender, perspektif structural fungsional melihat aspek kesejarahan pada masyarakat pra-industri terutama munculnya pembagian kerja berbasis jenis kelamin yang terjadi pada masyarakat pra industri dimana peran laki-laki dan perempuan dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Laki-laki berperan dalam penyedia makanan melalui kegiatan berburu sementara perempuan menjadi peramu di dalam wilayah rumah. Implikasi dari pandangan tersebut adalah munculnya pembagian kerja berbasis jenis kelamin dimana laki-laki berperan di wilayah publik sementara perempuan bekerja di dalam wilayah privat atau di dalam rumah dan

keluarga. Jika ditelisik lebih lanjut, peran laki-laki memiliki dimensi yang lebih luas, karena peran di wilayah publik memiliki dimensi yang lebih luas, dibandingkan wilayah privat. Bagi perempuan, tugas di wilayah privat atau di dalam rumah memiliki dimensi yang lebih sempit, dimana perempuan terbatas hanya berperan dari bidang reproduksi yaitu mengandung, memelihara anak, memelihara rumah, memelihara pekarangan, dan lain sebagainya. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan mengidamkan equilibrium atau keseimbangan. Dengan pembagian kerja berbasis jenis kelamin, masyarakat akan mengalami keharmonisan sehingga meminimalisir konflik, karena pembagian kerja tersebut dianggap dapat meminimalisir konflik terutama dalam keluarga.

Pendekatan struktural-fungsional dianggap masih relevan jika diterapkan dalam masyarakat modern. Pembagian peran secara jenis kelamin dianggap sebagai suatu yang biasa dan wajar adanya (Nasaruddin Umar, 1999: 53). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Penyimpangan terjadi karena munculnya konflik antar fungsi dalam keluarga. Oleh karena itu, maka sistem sosial berupa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus dijamin keutuhannya.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa data penelitian didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan kebijakan pengarusutamaan gender melalui berbagai tindakan dan kebijakan di bidang kependidikan, namun masih saja ditemui berbagai kendala terutama berhubungan dengan sikap dan nilai budaya masyarakat yang masih resisten terhadap budaya gender.
2. Pandangan mahasiswa tentang gender terbagi menurut tiga karakteristik teori;
 - a. Pandangan mahasiswa berpendapat bahwa kesetaraan gender itu adalah kesamaan posisi, derajat, kedudukan, hak, dan kewajiban antara Laki-laki dan Perempuan. Implikasi dari pandangan tersebut terletak dari pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara Laki-laki dan perempuan dalam memperoleh dan mendapatkan posisi di masyarakat. Setiap individu berhak mendapatkan posisinya di masyarakat tanpa adanya pembatasan dari jenis kelamin lainnya. Oleh karena itu, perempuan dan Laki-laki berhak untuk memperjuangkan posisinya masing-masing.
 - b. Pandangan mahasiswa yang percaya bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan oleh karena itu maka perbedaan akan konstruksi sosial

antara keduanya harus dihapuskan. Namun, ada perbedaan yang tidak dapat dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut terletak pada fisik antara jenis kelamin tersebut, atau dalam kata lain terdapat perbedaan biologis antara keduanya. Oleh karena itu, maka walaupun dimungkinkan tidak ada perbedaan dalam konstruksi sosial, namun perbedaan dalam hal biologis akan berpengaruh dalam hal kehidupan dan peran-peran juga dimasyarakat.

Pandangan mahasiswa yang tidak menyetujui kesetaraan gender. Pandangan tersebut berasal dari kenyataan bahwa Mahasiswa memandang tidak perlu ada kesetaraan gender, karena peran dan posisi masing-masing individu tidak lah sama. Oleh karena itu, mengingat peran dan posisi masing-masing telah ditentukan baik oleh faktor biologis maupun faktor sosial, maka tidak perlu ada kesetaraan gender.

REFERENSI

- Lindsey LL and Christie S. (1997) *Gender roles: A Sociological Perspective*: Prentice Hall.
- Marzuki (2013) *Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender*. UNY Press
- Megawangi, Ratna (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan. Cet. I.
- Mulia, Siti Musdah (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gradedia Pustaka. Utama. Cet.
- Rosalie, Pitt (2011) *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Agama di Malang dan Batu*.



Australian Consortium for in-country
Indonesian Studies (acicis)
Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen
Kesetaraan Jender: Perspektif Al-
Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet. I